

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Temuan lapangan dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya menjadi dasar pengambilan kesimpulan dalam pengelolaan dana desa di Desa Weranggere. Berikut adalah simpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian ini.

Pemerintah Desa Weranggere telah melaksanakan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan peraturan yang ada dengan baik. Temuan lapangan yang memperlihatkan bahwa pertanggungjawaban keuangan desa di desa weranggere telah dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada, hanya adanya keterlambatan pelaporan realisasi anggaran, karna dampak dari keterlambatan pencairan dana desa yang seharusnya bisa masuk ke rekening desa sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Proses pertanggungjawaban dengan menyampaikan laporan-laporan pertanggungjawaban seperti informasi media tentang laporan realisasi APB Desa, catatan atas laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan dan program daerah yang masuk ke Desa dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Adanya keterlambatan merupakan dampak dari keterlambatan pencairan dana desa, sehingga hal itu merupakan faktor eksternal, tidak sepenuhnya menjadi kesalahan dari Pemerintah Desa.

6.2 Saran

Saran-saran yang dapat direkomendasikan dari hasil penelitian ini, yaitu:

1. Pertanggungjawaban Pemerintah Desa dalam melakukan pengelolaan keuangan desa harus mengikuti seluruh pedoman peraturan-peraturan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat yang terkait dengan keuangan desa, dengan tetap melibatkan seluruh unsur masyarakat dalam seluruh tahapan pengelolaan keuangan desa untuk memenuhi asas transparansi, akuntabilitas dan partisipatif .
2. Masyarakat Desa dapat mendukung Pemerintahan Desa dengan turut aktif dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa demi tercapainya tujuan pembangunan dan pemberdayaan desa dalam memajukan perekonomian desa serta mensejahterakan masyarakat desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Hendro Pujo Sasongko. (2013). Implementasi Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan Desa Berdasarkan Perda No 16 Tahun 2007 Tentang Keuangan Desa. *e-Journal Ilmu Pemerintahan*. Vol. 1, No.4 (<http://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id>, diakses 8 Des 2016).
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Kabupaten Flores Timur Dalam Angka*. Flores Timur: BPS
- Bastian, Indra. (2010). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Erlangga.
- Bastian, Indra. (2015). *Akuntansi untuk Kecamatan dan Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Febrian. (2014). Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Lubuk Sakat dalam Mewujudkan Pembangunan Desa Lubuk Sakat Tahun 2012. *Jom FISIP Volume I No. 2- Oktober 2014*. (<http://jom.unri.ac.id/index.php/JQMFSiP/article>, diakses 13 Desember 2016).
- Hoesada, Dr. Jan. (2016). *Akuntansi Pemerintah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi. (2020). *Indeks Desa Membangun*. Kemendes
- Kurnia, Dadang. (2015). *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta: BPKP
- Lestari, Ayu Komang Dewi dkk. (2014). *Membedah Akuntabilitas Praktik Pengelolaan Keuangan Desa*. Jurusan Akuntansi Program SI. Vol: 2 No:L (<http://download.portalgamda.org/article>. diakses 16 Nov 2016).
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta; ANDL
- Pangayow, B.J. (2017). *Gap Ekspektasi Kualitas Laporan Keuangan Kampung antara Pengelola Keuangan dan Masyarakat*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. (2014). Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 43 tahun 2014 pasal 103-104 mengatur tata cara pelaporan yang wajib dilakukan oleh kepala desa*.
- Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern*.

- Peraturan Desa Weranggere No.3 Tahun 2019. Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran 2019.*
- Sugiyono. 2012. *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sujarweni, V.Wiratna. (2015a). *Akuntansi Desa*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sujarweni, V.Wiratna. (2015b). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sujarweni, V.Wiratna. (2015c). *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sumpeno, Wahjudin. (2011). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa*. Acch: The World Bank.
- Undang-undang No. 15 tahun 2004. tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara.*
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.*
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (2014/ Jakarta: Pemerintah Negara Republik Indonesia.*